



BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Perencanaan Komunikasi Lingkungan dalam Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Bengkalis

Perencanaan komunikasi pengembangan ekowisata bakau sangat terkait erat dengan dengan pengembangan kawasan hutan secara umum (Astuti & Widodo, 2018). Terkait dengan perencanaan komunikasi lingkungan ini, pemerintah memiliki kebijakan dalam pengelolaan ekosistem mangrove yang sudah diatur dalam peraturan presiden nomor 73 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Pemerintah Indonesia, 2012). Kebijakan pengembangan ekowisata di daerah juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2009 (Pemerintah, 2009).

Upaya rehabilitasi dan konservasi hutan bakau untuk pengembangan ekowisata memerlukan partisipasi aktif dari penduduk lokal sebagai aktor atau pelaku konversi (Rusdianti & Sunito, 2012). Pemerintah telah menempatkan masyarakat melalui kelompok-kelompok untuk merehabilitasi dan mengembangkan hutan bakau sebagai ekowisata. Musyawarah dan gotong-royong selalu digunakan oleh kelompok-kelompok tempatan sebagai langkah untuk merumuskan tujuan dan kegiatan dalam membangun ekowisata mangrove. Pertemuan rutin dilakukan tidak hanya sekedar untuk musyawarah, namun bertujuan untuk menjaga silaturahmi antar anggota, dan juga sebagai wadah untuk berbagi gagasan. Pembangunan ekowisata yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaannya dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat ataupun pemerintah setempat (Ridwan, Muchsin, & Hayat, 2017).

Kepedulian untuk menyelamatkan Pulau Bengkalis dari abrasi dan upaya pengembangan ekowisata mangrove tidak saja dilakukan warga, tetapi juga menjadi kepedulian pemerintah Kabupaten Bengkalis. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

33 tahun 2009 tentang Pedoman Ekowisata di Daerah pada bab 3 bahwa pengembangannya harus ada perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian (Pemerintah, 2009). Dalam peraturan tersebut juga diatur bahwa pemerintah daerah dalam membuat kebijakan harus memberdayakan masyarakat dan berkoordinasi dengan berbagai instansi. Pemerintah telah membuat kebijakan dan mengkomunikasikan kepada masyarakat melalui beberapa program pemberdayaan melalui membina komunitas nelayan atau kelompok masyarakat. Program pemerintah mengatasi abrasi juga dilakukan dengan cara membangun pemecah gelombang dan membuat tembok pantai di daerah tertentu, namun tidak efektif.

Selain itu, berbagai pendekatan, program dan metode komunikasi telah digunakan untuk mencegah kerusakan hutan mangrove dan abrasi yang semakin parah. Namun komunikasi lingkungan masih belum menjadi komponen penting, kalau pun ada implementasinya belum terintegrasi secara menyeluruh. Padahal komunikasi lingkungan tidak bisa dipisahkan dari perencanaan dan strategi komunikasi untuk mendukung pembuatan kebijakan, partisipasi publik, dan implementasinya pada kepedulian lingkungan. Meskipun demikian perencanaan komunikasi lingkungan sudah menggunakan beberapa tahap.

5.1.1 Analisis Masalah, Khalayak dan Penentuan Tujuan Komunikasi

Tahap ini terdiri dari langkah analisis situasi dan identifikasi masalah, analisis khalayak/pelaku yang terlibat, dan penentuan tujuan komunikasi. Penentuan tujuan komunikasi adalah untuk memanfaatkan dan memfokuskan kekuatan dari sistem komunikasi yang dihasilkan untuk membuat komunikasi lebih efektif dan efisien (Jurin et al., 2010). Ada kesadaran dan pemahaman dari masyarakat tentang permasalahan lingkungan dan bertanggung jawab secara bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan masalah abrasi dan kerusakan hutan bakau di daerahnya terutama yang berada di wilayah pesisir Pulau Bengkalis. Selain kerusakan daratan akibat terjadinya abrasi, adanya penebangan hutan bakau secara terus menerus untuk dijadikan arang, kayu bakar dan bahan bangunan tanpa menanam kembali (Miswadi,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Fidias, & Jhonnerie, 2017). Sebagaimana masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungannya. Ketua Kempas mengungkapkan:

“awal terbentuknya kelompok Kempas ini karena rata-rata anggota kita adalah nelayan, maka mereka tahu bagaimana kondisi daerah pesisir. Sehingga ada keinginan dari anggota kita untuk mengelola daerah tersebut. Kita mencari mitra ke lembaga pemerintah diberi bantuan, dan akhirnya kita bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Kami bermusyawarah dengan anggota dan melibatkan satu orang dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Adapun hasil dari musyawarah tersebut berupa membuat program Hutan Mangrove”. (Wawancara, Zakaria, Ketua KEMPAS, 26 /02/2019).

Kegelisahan dan keresahan sebagian masyarakat terhadap kerusakan hutan bakau dan abrasi adalah bentuk kesadaran masyarakat sebagai cara menganalisis dan menyelesaikan masalahnya. Sehingga pengembangan ekowisata merupakan salah satu alternatif pembangunan yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut (Astuti & Widodo, 2018). Kegiatan musyawarah dan gotong-royong menjadi kekuatan masyarakat sebagai bentuk komunikasi kelompok. Analisis melalui musyawarah ini berusaha untuk merespon masalah lingkungan hutan bakau yang ada. Sebagai kelompok usaha bersama yang berada di Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis, Kempas awalnya hanya bergerak di bidang penangkapan ikan. Kemauan yang kuat kelompok ini mendorong mereka menciptakan dan mengembangkan wisata hutan mangrove dan mengkampanyekan untuk diikuti kelompok lain. Informan dari Dinas Kelautan dan Perikanan mengungkapkan:

“saya senang dengan kemauan kelompok Kempas ini, karena mereka sangat antusias. Kami mengadakan rapat waktu itu dari sekitar selepas isya’ sampai sekitar jam 4 pagi untuk membahas bagaimana program yang akan kita realisasikan. Kita memang langsung bergerak untuk mengerjakan program mangrove ini, kita langsung ke lokasi dan membuat proposal permohonan untuk dimasukkan ke beberapa instansi terkait. Kita juga membuat MasterPlan hutan mangrove yang kita kelola, yang isinya ada seperti kolam pasang surut, pondok-pondok, jalur jembatan di dalam hutan mangrove, tempat bibit-bibit bakau baru”. (Wawancara, Sofian, 20/03/2019).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Kampanye komunikasi lingkungan dilaksanakan sebagai tanggapan terhadap isu masalah dan kebutuhan akan lingkungan yang lebih baik (Jurin et al., 2010). Pengelolaan hutan mangrove di beberapa desa di Pulau Bengkalis dilakukan tidak hanya inisiatif masyarakat tapi sudah menjadi bagian permasalahan pemerintah. Dinas Kelautan dan Perikanan yang belakangan perannya diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup juga berperan aktif dalam memberikan gagasannya kepada Kempas untuk mengelola hutan mangrove sebagai destinasi wisata.

5.1.2 Pemilihan Media dan Saluran Komunikasi

Tahap ini mencakup upaya pengembangan strategi komunikasi, pemilihan media dan saluran komunikasi dan penggunaan pendekatan memotivasi dan memobilisasi masyarakat. Mempertimbangkan anggaran secara keseluruhan, perencanaan komunikasi harus memutuskan pilihan media massa yang mungkin efektif dalam menyampaikan pesan dan mencapai tujuan rencana (Jurin et al., 2010). Dengan adanya program pengembangan hutan mangrove sebagai ekowisata, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis menggunakan saluran komunikasi antarpribadi, kelompok, publik (sosialisasi) dan penggunaan media massa lainnya untuk memberikan kesadaran lingkungan kepada masyarakat. Saluran dengan mengandalkan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli lingkungan hutan bakau adalah yang diutamakan. Dinas ini telah memilih saluran komunikasi kelompok dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas. Dalam hal ini, tokoh masyarakat dan pamong budaya sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan penyambung lidah masyarakat memegang kunci untuk pengembangan ekowisata hutan bakau (Setyowati, 2010).

Komunikasi lingkungan ini diupayakan agar dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat atau kelompok lain untuk memanfaatkan potensi dan melestarikan lingkungan yang ada di daerahnya. Sekretaris KEMPAS menjelaskan:

“setelah penanam bibit mangrove, kita adakan sosialisasi mengenai cara penanam bibit bakau dan bagaimana pengelolaan mangrove. Kita bekerjasama dengan BLH (Badan Lingkungan Hidup) waktu itu, karena yang menyampaikan



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

materinya juga dari mereka. BLH juga memberikan bantuan berupa bibit bakau sebanyak 1500 bibit bakau. Kita sering mengadakan sosialisasi kepada kelompok-kelompok lain baik yang di Desa Sebauk maupun kelompok di luar Desa Sebauk, hal ini bertujuan untuk memberikan sebuah pemahaman bagaimana caranya kita untuk menjaga lingkungan kita” (Wawancara, Nurhadi, 26/02/2019).

Keberhasilan suatu destinasi wisata tidak lepas dari peran pemerintah, pemerintah sangat berperan penting dalam penyedia infrastruktur pariwisata (Ridwan et al., 2017). Pemerintah membentuk kelompok-kelompok dan difasilitasi dengan bantuan berupa biaya pembibitan, penyediaan polibek dan berbagai peralatan pertanian. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis juga meminta pada masing-masing kepala desa mengawal program tersebut agar program ini dapat berjalan baik. Pemerintah melalui dinas terkait melibatkan Dinas Perikanan dan Kelautan, kepala desa, dan tokoh masyarakat lainnya dalam komunikasinya. Namun sayang koordinasi ini tidak dilakukan dengan melibatkan stakeholder yang lebih luas, bahkan pengembangan ekowisata tanpa melibatkan dinas pariwisata. Padahal marketing komunikasi pariwisata yang terintegrasi membutuhkan pendekatan yang terkoordinasi dan terintegrasi antara komunikasi antarpribadi dengan saluran komunikasi lainnya (Karta & Suarhana, 2014).

Komunikasi lingkungan Kempas ini dapat dianggap berhasil memotivasi, menularkan dan memberi kesadaran mengenai pengelolaan lingkungan hutan bakau. Keberhasilan ini didukung dengan pilihan saluran komunikasi yang dikombinasikan dengan getuk tular (*word of mouth*). *Gethok tular* (pesan berantai) merupakan komunikasi dari mulut ke mulut yang sangat efektif untuk menyampaikan informasi tentang kelestarian lingkungan kepada masyarakat (Darmastuti, Bajari, Martodirdjo, & Maryani, 2017). Keberhasilan komunikasi ini terlihat dari adanya penanaman hutan mangrove baru yang ada di Desa Pangkalan Batang, yang merupakan desa yang bersebelahan dengan Desa Sebauk. Selain itu ada peningkatan permintaan bibit bakau dari kelompok-kelompok lain untuk ditanam di wilayahnya, sebagai upaya untuk



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

mengatasi wilayah yang terkena abrasi dan upaya untuk meniru dalam mengembangkan kawasan ekowisata hutan bakau.

Pembinaan melalui komunikasi interpersonal yang intens membuat komunikasi lingkungan lebih efektif. Komunikasi interpersonal berperan sebagai penghubung antara individu-individu atau kelompok-kelompok. Namun pilihan saluran komunikasi kelompok sangat efektif dalam pemberdayaan diperkuat dengan pendekatan komunikasi partisipatif (Amanah, 2010; Yasir et al., 2017). Kebijakan dan dukungan aparat pemerintah melalui komunikasi yang tepat sangat penting dalam keberhasilan program ekowisata mangrove ini.

5.1.3 Pengembangan Pesan dan Produksi Media

Tahap ini terdiri dari langkah-langkah mengembangkan pesan dan memproduksi media. Kombinasi pesan dan media dipertimbangkan dengan mendasarkan pada khalayaknya (Jurin et al., 2010). Media sangat penting untuk menghasilkan, mereproduksi dan mendistribusikan pesan baik oleh pemerintah maupun masyarakat (Yasir et al., 2017). Pesan komunikasi lingkungan diarahkan dalam upaya untuk mengubah kebiasaan khalayak yang tidak peduli menjadi peduli terhadap lingkungan. Pengemasan pesan komunikasi lingkungan dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dengan bekerjasama dengan kelompok-kelompok seperti KEMPAS. Pesan yang disebar oleh pemerintah masih sangat formalistik, instruksi yang umumnya dengan melakukan sosialisasi seperti melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap beberapa kelompok masyarakat. Sosialisasi dan pembentukan kelompok pengelolaan lingkungan hidup tersebut, dilatarbelakangi oleh persoalan lingkungan yang rusak. Selain itu, pemerintah berupaya untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan ekosistem agar ada penyangga lingkungan pantai maka perlu dilakukan penanaman kembali hutan Mangrove.

Komunikasi lingkungan efektif bila pesan-pesannya menjadi kampanye yang direncanakan (Jurin et al., 2010). Pemerintah menggunakan pesan-pesan untuk menghimbau dan mengajak masyarakat untuk menjaga dan melestarikan ekosistem



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

yang ada melalui billboard di pantai tertentu. Pilihan pesan ini menyesuaikan keadaan lingkungan perairan pantai di Kabupaten Bengkalis yang mengalami kerusakan akibat abrasi. Pesan komunikasi lingkungan dikemas dalam tayangan video dokumentasi tentang proses pengelolaan program Kempas, seperti diputar di stand Dinas Lingkungan Hidup pada acara MTQ di Selatbaru. Penayangan video tersebut untuk mempromosikan dan bentuk kampanye lingkungan. Selain itu, Stand Dinas Lingkungan Hidup juga menampilkan sketsa fisik dari masterplan program ekowisata mangrove.

Gambar 1 dan 2:
Produksi Pesan dan Saluran Komunikasi Lingkungan Melalui Pameran dan sosialisasi



Gambar 3 dan 4:
Himbauan melalui plang nama dan Pelatihan Mengolah Kuliner Mangrove



Sumber : Berbagai sumber



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Lingkungan Hidup, memberikan himbauan dan memberi contoh kepada masyarakat dan pengunjung acara untuk selalu peduli dengan hutan mangrove. Selain itu, masih ada beberapa pilihan media seperti dengan menggunakan media papan peringatan, spanduk atau baliho. Pesan ini dibuat dengan harapan agar masyarakat dan pengunjung di ekowisata bakau memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan.

5.1.4 Implementasi Program dan Evaluasi Komunikasi

Tahapan ini terdiri dari langkah mengelola untuk mengimplementasikan penyebaran pesan melalui media, aksi nyata, monitoring dan evaluasi. Rencana komunikasi lingkungan harus selalu menyertakan deskripsi tentang bagaimana proyek akan dievaluasi (Jurin et al., 2010). Evaluasi komunikasi dalam upaya penyadaran masyarakat terhadap lingkungan hutan mangrove memang belum berjalan karena evaluasi tidak maksimal dilakukan. Komunikasi lingkungan kuncinya ada pada prioritas, komitmen implementasi kebijakan pemerintah. Implementasi kebijakan penyebaran pesan-pesan komunikasi lingkungan harus terkoordinasi antar instansi dan terintegrasi dengan berbagai jenis media dan saluran komunikasi. Proses monitoring dan evaluasi program komunikasi lingkungan dalam pengembangan ekowisata tidak bisa dilakukan sesaat, ia mesti dilakukan secara berkelanjutan dengan prinsip musyawarah dan gotong-royong. Kegiatan rehabilitasi dan konservasi mangrove membutuhkan pengawasan dan pemeliharaan secara berkelanjutan (Rusdianti & Sumito, 2012).

Komunikasi lingkungan dengan musyawarah adalah bentuk budaya masyarakat yang unik. Para anggota selalu bermusyawarah dan bergotong-royong dalam menyelesaikan masalah dan mengelola kawasan mangrove. Apa pun masalah yang ada selalu dipustuskan melalui musyawarah antar anggota terutama dalam mengevaluasi setiap program yang sudah dilakukan. Dokumentasi selalu diambil untuk melakukan evaluasi sejauh mana perkembangan yang dilakukan dan ini juga disimpan untuk diarsipkan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan. Dokumentasi ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

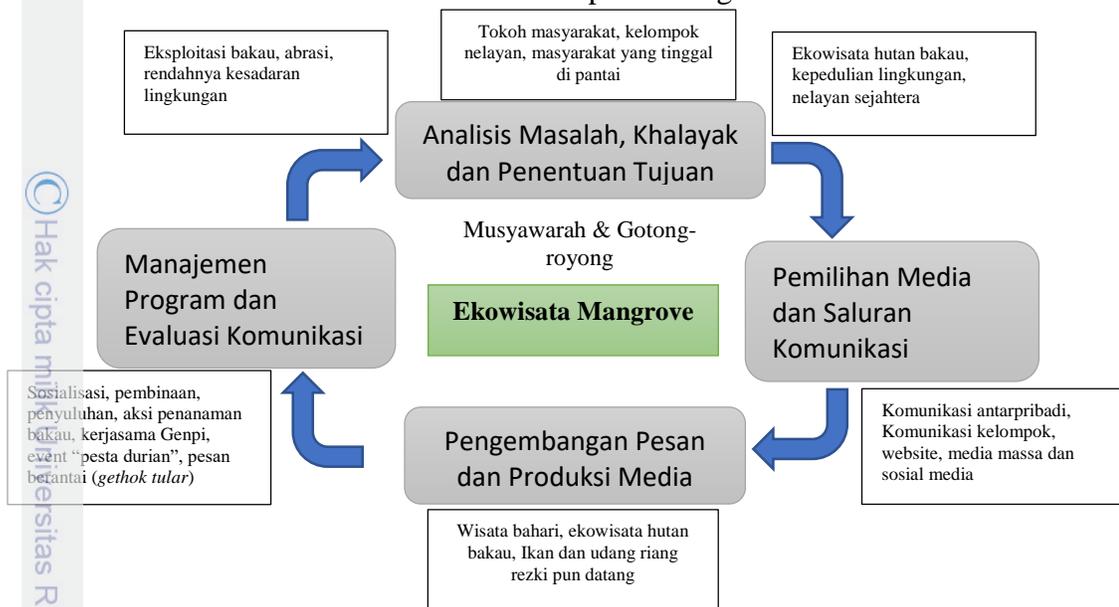
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

jugalah yang kemudian digunakan sebagai media kampanye dalam penyadaran dan pembinaan masyarakat atau kelompok lain yang ingin belajar untuk mengikuti program ini.

Implementasi pengembangan ekowisata dapat meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam kegiatan konservasi bila memberi manfaat bagi mereka (Paris, Soekmadi, & Susilo Arifin, 2017). Oleh karena itu, program komunikasi lingkungan melalui pembinaan kelompok seperti Kempas ini lebih efektif karena dapat menjadi contoh bagi masyarakat atau kelompok lain. Kelompok ini memiliki kontribusi bagi perkembangan dan peningkatan gerakan penanaman kembali pohon bakau.

Kerja sama antara Kempas dan Generasi Pesona Indonesia (Genpi) Bengkalis untuk menggelar festival makan durian di kawasan hutan mangrove dapat mempromosikan dan membranding ekowisata mangrove. Selain itu, program festival makan durian juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan mangrove dan kepedulian mereka pada lingkungan. Dalam jangka panjang Kempas menginginkan masyarakat mengubah kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola lingkungannya.

Gambar 2:
 Model Perencanaan Komunikasi Lingkungan dalam Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Bengkalis





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Komunikasi lingkungan berupaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk merespon dengan tepat sinyal lingkungan yang relevan dengan kesejahteraan peradaban manusia dan sistem biologis alami (Cox, 2010). Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis berperan penting dalam membuat kebijakan dan perencanaan komunikasi mengatasi masalah lingkungan di Kabupaten Bengkalis. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 pada Pasal 1 poin 6 yang menyebutkan bahwa “pelaku ekowisata adalah pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat yang bergerak di bidang wisata” (Pemerintah, 2009). Program komunikasi dijalankan melalui sosialisasi, pembinaan dan juga fasilitator terhadap kelompok-kelompok masyarakat.

Komunikasi lingkungan dalam mengembangkan ekowisata mangrove semestinya menggunakan bauran saluran dan media komunikasi dengan menggunakan teknik dan metode komunikasi yang beragam dengan lebih kreatif. Komunikasi yang dilakukan memang bersifat dialogis atau interaktif dengan model musyawarah dan gotong royong. Komunikasi melalui pembinaan kelompok peduli lingkungan mangrove oleh pemerintah menguatkan kekompakan di antara anggota. Pemerintah menguatkan pesan-pesan terkait isu-isu lingkungan, kerusakan mangrove, abrasi, melalui kelompok yang dibina untuk diteruskan kepada masyarakat lainnya. Komunikasi lingkungan ini harus terus dievaluasi secara berkelanjutan untuk pembangunan yang berkelanjutan agar terus mengalami penyempurnaan untuk mencapai suatu kesepakatan dan tujuan yang diinginkan yaitu kelestarian hutan bakau dan kesejahteraan masyarakat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Partisipasi Masyarakat dalam mengelola ekowisata mangrove di Kabupaten Bengkalis.

Partisipasi masyarakat dalam mengkampanyekan dan mengelola mangrove ada dalam bentuk kelompok nyata yang langsung berada di desa. Kelompok ini mengelola dan melestarikan hutan mangrove. Kelompok pengelola mangrove di kabupaten Bengkalis di bawah binaan dinas Lingkungan hidup di antaranya yaitu KEMPAS di desa Sebauk, Blukap di Desa Teluk Pambang, Kelompok Jaya di Bantan Air, Kelompok Persatuan Nelayan Jala Sejahtera (PNJS) Desa Jangkang, dan lain-lain. Masyarakat ini sudah berusaha aktif menanam dan menjaga kelestarian hutan bakau di derah masing-masing tempat tinggal mereka. Selain itu ada juga yang di komunitas yang bergerak melakukan kampanye di dunia maya dengan aktif di media sosial dengan sesekali bergerak menanam dan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dan sesekali turun dengan terlibat aktif menanam bersama kelompok-kelompok yang dibina pemerintah daerah.

Dalam konteks komunikasi pemberdayaan masyarakat, usaha untuk memilih strategi atau menggunakan model komunikasi yang tepat sangat penting dalam menyampaikan suatu isu, ide, atau gagasan ideal. Komunikasi lingkungan tentu berkaitan dengan perubahan menuju pembangunan masyarakat yang akan memberikan inspirasi dalam mengelola lingkungan. Komunikasi ini seperti ini tentu memerlukan penggalian kreativitas, kepentingan, aspirasi, dan kebutuhan individu, kelompok, dan masyarakat dan diharapkan akan bermunculan ide, gagasan dan inovasi dari kalangan akar rumput (Dilla, 2007:5).

Komunikasi dengan pemberdayaan kelompok masyarakat merupakan suatu proses komunikasi yang bertujuan menumbuhkan motivasi dan memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok masyarakat. Komunikasi lingkungan yang menggunakan semua saluran-saluran komunikasi sehingga masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik melalui pemanfaatan dan peningkatan kemampuan yang mereka miliki dan sekaligus menempatkan mereka sebagai



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

stakeholder aktif. Komunikasi dan masyarakat merupakan dua sisi yang saling melengkapi (Hamijoyo, 2005: 4).

Pemerintah telah mengajak masyarakat untuk berperan aktif untuk memecahkan masalahnya sendiri. Permasalahan lingkungan dapat dibahas dalam bentuk komunikasi yang mengkondisikan mereka bebas berpendapat dan mengungkapkan diri secara terbuka sesuai nilai yang mereka miliki yaitu dengan bermusyawarah. Oleh karena itu, model komunikasi partisipatif sangat efektif dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan di Pulau Bengkalis. Model partisipatif ini memiliki anggapan bahwa manusia bukanlah komunikan yang pasif, tetapi merupakan hasil dari lingkungan sosialnya (Setyowati dalam Sulistyowati, dkk, 2005:87).

Dalam upaya mengurangi abrasi yang terjadi di Pulau Bengkalis, beberapa kelompok yang berpartisipasi melestarikan hutan bakau tersebar di daerah yang memiliki hutan mangrove dan terutama yang pantainya mengalami kerusakan karena abrasi. Kelompok Masyarakat Konservasi Lingkungan Pesisir di Desa Teluk Papal misalnya melakukan aksi penanaman mangrove. Beberapa persoalan yang dihadapi saat melakukan restorasi hutan bakau adalah rendahnya tidak hidup bibit yang ditanam akibat gelombang yang cukup kuat menghantam pantai.

“Abrasi ini memang salah satu momok yang menakutkan bagi kami masyarakat pesisir. Abrasi sudah merusak dan mengancam kebun, pertanian bahkan pemukiman warga. Jika ini tidak diatasi, bias-bisa kampung Papal hanya tinggal nama. Sejauh ini bakau yang kami tanam tingkat kehidupan minim sekali. Untuk itu kami mengharapkan pembinaan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan” (wawancara, Ponimen, Ketua Kelompok Masyarakat Konservasi Lingkungan Pesisir Desa Teluk Papal).

Kelompok konservasi binaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis ini berharap dari dinas terkait untuk membangun pemecah gelombang dan mengusahakan agar ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya abrasi dan kerusakan tanaman mangrove yang mereka tanam. Terkait dengan ini kegiatan rehabilitasi dan konservasi lingkungan pesisir pantai Bengkalis sudah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis. Pemerintah melalui dinas terkait



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

baik Dinas Kelautan dan Perikanan maupun Dinas Lingkungan Hidup sudah pernah melaksanakan sistem penanaman mangrove dengan metode memasang batu berjong di depan bibit yang ditanam dengan konstruksi yang tidak terlalu tinggi. Tujuannya sebagai peredam gelombang sehingga kecepatan gelombang melemah pada saat mengenai bibit mangrove yang ditanam. Dengan teknik ini diharapkan bisa mengurangi tingkat kematian bibit mangrove. Pemerintah berharap kelompok yang mendapat binaan maupun yang tidak mendapat binaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, agar tetap bisa melaksanakan kegiatan ini meskipun tidak mendapat dana pembinaan atau reward. Karena apa yang dilaksanakan ini salah satu upaya perbaikan wilayah pesisir dan yang terpenting mempertahankan keutuhan NKRI (<https://www.riau.go.id/home/content/2015/06/18/3752-kurangi-abrasi-masyarakat-papal-bengkalis-tanam>).

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis dalam pembinaan kelompok masyarakat mengupayakan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan baik terhadap lingkungan hidup (good enviromental governance). Dinas memiliki program yang juga program nasional yaitu Program Kampung Iklim (Proklim). Proklim adalah program milik pemerintah pusat yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Program ini berupaya untuk melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal sesuai kondisi wilayah. Tujuan Proklim dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya sehingga seluruh pihak terdorong untuk melaksanakan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK. Secara umum memang kegiatan pemerintah masih formalistik membuat kegiata-kegiatan peningkatan peran serta kelompok masyarakat,



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

melalui sosialisasi, pembinaan dan penilaian untuk diberi penghargaan. Penghargaan kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam Proklamasi didasarkan pada penilaian untuk diusulkan agar menerima penghargaan di tingkat yang lebih tinggi baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat.

Salah satu penghargaan yang didapatkan di tingkat nasional yaitu dua desa dari Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis yaitu Desa Teluk Papal yang memperoleh trofi penghargaan beserta sertifikat. Sementara Desa Mentayan hanya mendapatkan sertifikat. Penghargaan ini diperoleh karena bentuk partisipasi atau peran aktif masyarakat desa dalam memelihara lingkungan terutama melestarikan hutan bakau. Hal ini sesuai dengan keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 888/MENLHK/PPI/API/2016. Desa Papal dan Desa Mentayan ini merupakan desa binaan Dinas Lingkungan hidup terutama dalam memelihara dan merehabilitasi hutan mangrove. Terkait dengan ini, pemerintah sangat mengharapkan kepada pihak perusahaan agar memberi kontribusi bagi pembinaan kelestarian lingkungan, kalau pun ada masih sangat sedikit. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan mengungkapkan:

“Keterlibatan pihak perusahaan untuk membina masyarakat di Bengkalis masih rendah. Selain koordinasi dan sinkronisasi kegiatan belum terarah bahkan dilakukan secara parsial. Memang diperlukan campur tangan pemerintah untuk mendorong perusahaan agar memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok sebagai bentuk CSR. Dalam pengembangan Proklamasi perlu upaya intensif dari DLH untuk membina dan menguatkan kelompok-kelompok proklamasi sehingga nanti muncul kampung iklim yang tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan tapi memberikan kebanggaan kepada Kabupaten Bengkalis” (Wawancara, Agus Susanto, Agustus 2019).

Pelibatan masyarakat dalam mengelola hutan bakau agar tetap lestari dan memperbaiki yang rusak sudah dilakukan oleh Pemerintah dengan membina kelompok-kelompok masyarakat di pesisir yang memiliki hutan mangrove dan abrasi pantainya cukup parah. KEMPAS merupakan nama Kelompok Usaha Bersama yang ada di Desa Sebauk yang dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. KEMPAS berfokus pada bidang perikanan dan pengelolaan mangrove di Desa Sebauk.



Melalui Kelompok Usaha Bersama yang bernama KEMPAS diharapkan dapat meningkatkan skala ekonomi (*economies of scale*), meningkatkan kapasitas, kompetensi dan daya saing usaha nelayan yang berkaitan dengan sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembinaan yang telah dilakukan dari beberapa instansi pemerintah terkait program ekowisata mangrove yaitu dengan memberikan sosialisasi, pembinaan seperti pelatihan, monitoring, fasilitator dan juga memberikan bantuan berupa bibit bakau.

Program Hutan Mangrove dilatarbelakangi permasalahan yang terjadi di pantai dan pinggiran laut pulau Bengkalis, dengan alasan dikhawatirkan keseimbangan ekosistem dipinggiran pantai Pulau Bengkalis akan semakin terganggu, karena adanya kerusakan dan kepunahan hutan mangrove yang mengelilingi pulau Bengkalis. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, melakukan sosialisasi, kemudian membina dan membentuk kelompok yang kompeten untuk terus melestarikan hutan Mangrove tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala DLH Arman AA melalui Sekretaris Agusrizal, Kamis (26/6/2014) siang dikantornya, dikatakan,

“DLH Bengkalis di tahun 2014 ini telah membentuk 4 kelompok di dua Kecamatan, yakni Kecamatan Bengkalis dan Bantan sesuai yang ditunjuk oleh Camat setempat, yakni di Kecamatan Bantan 2 kelompok dan di Kecamatan Bengkalis juga 2 kelompok” (sumber dari media online Bengkalis,Utusanriau.Co)

Pihak DLH melakukan pembentukan kelompok untuk melestarikan hutan mangrove itu bertujuan agar kelompok yang telah dibentuk itu dapat melakukan penanaman kembali hutan mangrove yang mulai rusak tersebut. Hutan mangrove yang mengelilingi pulau Bengkalis ini mulai rusak dan akan merusak ekosistem yang ada. Oleh karena itu, bila ini dibiarkan akan menimbulkan abrasi lebih parah yang akan terus menenengelamkan Pulau Bengkalis. Pembentukan dua kelompok di Kecamatan Bengkalis dan dua kelompok lagi di Kecamatan Bantan ini tujuannya untuk menyelamatkan lingkungan agar tidak terjadi kerusakan lebih parah lagi. Untuk dua kelompok di Kecamatan Bengkalis yang ditunjuk oleh Camat kelompok Desa Sebauk



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan Desa Penebal dan yang di Kecamatan Bantan kelompok Desa Teluk Pambang dan Desa Jangkang yang setiap kelompok terdiri dari 20 anggota. Sosialisasi dan pembentukan kelompok pengelolaan lingkungan hidup tersebut, dilatarbelakangi oleh persoalan lingkungan yang mulai rusak dan agar ada penyanggah lingkungan terutama di pantai dengan melakukan penanaman kembali hutan Mangrove.

"Kita mencoba supaya pokok mangrove ini dapat dilestarikan dan dapat hidup subur untuk penyanggah keseimbangan ekosistem dipinggiran pantai, sebab itu adanya peran serta masyarakat dengan dibentuk kelompok ini akan melakukan pembibitan mangrove dan melakukan penanaman secara berjenjang sesuai prosedur yang berlaku, " (Agusrizal. sumber dari media online Bengkalis, Utusanriau.Co)

Setiap kelompok yang telah dibentuk itu akan mendapatkan bantuan berupa biaya pembibitan, penyediaan polibek dan berbagai peralatan pertanian, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis meminta pada Kades bersangkutan untuk mengawal program tersebut, agar program ini dapat berjalan baik dan sesuai yang diharapkan bersama, dengan catatan program penanaman mangrove ini bukan untuk ditebang, tapi dilestarikan.

Kegiatan sosialisasi pembinaan kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupten Bengkalis. Sosialisai ini dilaksanakan di Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis, dimana diikuti 2 kelompok masyarakat yaitu KEMPAS (Kelompok Masyarakat Peduli Alam Sekitar) Desa Sebauk yang diketuai Zakaria dan Kelompok KEDABU Desa Penebal diketuai oleh Kaharudin, Kepala Desa Sebauk beserta perangkat, Dinas Perikanan dan Kelautan, Pengurus Bahtera Melayu, dan Tokoh Masyarakat. Bentuk komunikasi ini berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan hutan mangrove di sekitar tempat tinggal kelompok masyarakat ini.

Bentuk kegiatan pertemuan antar warga dengan diselingi sosialisasi ini adalah bentuk peran aktif masyarakat akan kepedulian lingkungan hutan mangrove. Secara bersama para peserta sosialisasi tersebut turun ke tepi pantai untuk melakukan penanaman mangrove (tanaman bakau) secara simbolis, dari hasil pantauan saat



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Repository of University of Riau
<https://repository.unri.ac.id>

kegiatan, terlihat hamparan luas tanaman bakau yang memiliki umur lebih dari 2 tahun yang tertanam rapat dan tertata berhasil meminimalisir tingkat abrasi pantai, ini membuktikan bahwasanya tingkat peduli lingkungan di Desa Sebauk sangat tinggi.

Bapak Nurhadi menjelaskan bahwa setelah mengadakan sosialisasi mereka langsung melakukan penanaman mangrove. Ini dilakukan sebagai bentuk realisasi dari apa yang telah disosialisasikan. Alasan lain sebagai bentuk simbolis bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup kepada KEMPAS. Berikut merupakan dokumentasi penanaman bibit bakau dari arsip KEMPAS.

Gambar 5.4 Penanaman bibit bakau oleh Dinas Lingkungan Hidup



Sumber : Arsip KEMPAS 2014

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis di Desa Sebauk ini merupakan langkah awal penciptaan sinergisitas program secara terpadu antar Instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan partisipasi kelompok peduli lingkungan yang mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat secara riil dengan konsep Budidaya Mangrove dan Ekosistemnya (budidaya ketam, bongan, sepetang dan lainnya).



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Keberhasilan program penyelamatan bakau di Desa Sebauk ini adalah murni Swadaya Masyarakat yang secara nyata telah berhasil meminimalisir tingkat abrasi pantai Sebauk. Penataan penanaman bakau dan budi daya turunannya yang telah dilakukan selama ini, telah dibuatkan oleh KEMPAS dalam bentuk masterplan dan maket plannya secara swadaya. Kegiatan kelompok ini merupakan dasar gerak dalam mensinergikan gerakan penyelamatan lingkungan hutan bakau, edukasi lingkungan bakau, penciptaan ekowisata bakau, dan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam pengembangan berikutnya, destinasi wisata hutan bakau ini dikembangkan dan dipromoiskan oleh berbagai elemen baik dari pemerintah, Generasi Pesona Indonesia (GENPI) dan juga mahasiswa yang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN).

Gambar: Partisipasi masyarakat dalam Pengembangan Ekowisata dan Spot foto oleh mahasiswa KKN



Masyarakat Sebauk melalui Kempas membangun sendiri ekowisata mangrove secara swadaya melalui gotong royong. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi tersebut disampaikan mantan Kepala Desa Sebauk dan juga anggota KEMPAS, Meftahuddin saat wawancara. Kegiatan pelestarian lingkungan pantai di Desa Sebauk dengan pengembangan tanaman bakau pola swadaya oleh masyarakat telah berlangsung selama 8 tahun, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi adalah kunci keberhasilan program penyelamatan lingkungan di Desa Sebauk.



“Semoga Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dapat mewujudkan usulan program yang telah diusulkan Desa Sebauk untuk penyelamatan lingkungan khususnya hutan bakau dan turunannya” (wawancara 27/02/2019 dengan Bapak Meftahuddin, anggota KEMPAS).

Mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting di wilayah pesisir. Secara lebih terperinci fungsi bio-ekologis dan sosio-ekonomis dari Mangrove adalah Sebagai tempat pemijahan, sebagai tempat berlindung fauna, habitat alami yang membentuk keseimbangan ekologis, perlindungan pantai terhadap abrasi, perangkap sedimen seperti partikel tanah dan endapan lumpur yang tidak hanyut oleh gelombang laut, sebagai penyerap bahan pencemaran, dan penahan angin laut, serta sumber bahan obat (Purnobasuki, 2005).

“saya memberikan program hutan mangrove ini kepada KEMPAS karena mangrove memang banyak sekali manfaatnya, baik itu dalam menjaga ekosistem juga bisa untuk cara kita menjaga lingkungan kita dari adanya kerusakan wilayah pesisir kita, Karena untuk saat ini tingkat abrasi di pulau Bengkalis ini memang agak parah. Fungsi dari hutan mangrove juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri, karena hutan mangrove merupakan tempat berkembangbiaknya spesies hewan laut, dan spesies hewan darat juga”. (wawancara 20/03/2019 dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Bapak Sofian).

Mangrove memang banyak memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar, seperti berfungsi untuk menjaga ekosistem yang ada disekitar mangrove, memberi tempat berlindung bagi fauna, menjadi tempat alami untuk keseimbangan ekologis, perlindungan dari abrasi, dan tempat mata pencaharian bagi masyarakat yang bernilai ekonomis maupun konsumtif.

“untuk saat ini memang belum banyak hasil yang dapat kita ambil dari mangrove ini, karena kita masih proses untuk berkembang lagi. Setidaknya mangrove sudah memberi tempat untuk masyarakat dalam mencari kebutuhannya sehari-hari, baik itu untuk dijual atau untuk dikonsumsi sendiri, karena dimangrove ini merupakan tempatnya lokan(kerang) dan siput berkembang biak” (wawancara 26/02/2019 dengan Bapak Nurhadi Sekretaris KEMPAS).

Keberhasilan KEMPAS dalam mengelola mangrove dapat dilihat dari penghargaan yang diberikan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau sebagai



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

kategori penyelamat lingkungan pada tahun 2016. Penganugerahan ini juga harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh lembaga. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Zakiah dari Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis yaitu :

“kita menyeleksi beberapa kelompok yang ada di Kecamatan Bengkalis yang kita ketahui dari data Kecamatan, awalnya kita undang mereka (kelompok) untuk mengikuti sosialisasi dari kita yang diadakan di Hotel Marina Bengkalis, disini kita memberi materi tentang bagaimana pengelolaan hutan mangrove, bagaimana manajemen kelompok, dan bagaimana program yang akan mereka lakukan dalam mengelola hutan mangrove. Sosialisasi kita adakan pada tahun 2016 sebelum kelompok memenuhi syarat ataupun kriteria yang sudah ditentukan, pada saat itu kelompok KEMPAS merupakan salah satu kelompok yang memenuhi kriteria sehingga bisa kita ajukan ke Dinas Provinsi sebagai utusan dari Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Bengkalis”. (wawancara 20/03/2019)

Menurut Ibu Zakiah, KEMPAS merupakan salah satu kelompok yang berhasil memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sehingga KEMPAS berhak diutus ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau sebagai perwakilan dari kabupaten Bengkalis, dan akhirnya mendapatkan penghargaan Setia Lestari Bumi kategori kelompok masyarakat penyelamat lingkungan. Berikut merupakan dokumentasi penghargaan dari Setia Lestari Bumi kategori kelompok masyarakat penyelamat lingkungan dari Dinas Provinsi Riau untuk KEMPAS.

Untuk melestarikan dan menjaga ekosistem bakau, Kempas mengembangkan daerah ini sebagai tujuan wisata dengan basis hutan bakau. Ekowisata mangrove ini dibuka untuk umum pada tahun 2016 tepatnya pada tanggal 21 april 2016, awal diketukanya ekowisata mangrove ini pengunjung begitu antusias berdatangan, pengunjung yang datang merupakan masyarakat dari berbagai daerah dan dengan berbagai macam tujuan. Seperti mahasiswa dari universitas malaysia yang berkunjung untuk mengadakan sebuah penelitian terhadap hutan mangrove, kunjungan dari Bupati Siak, Peninjauan dan sosialisasi dari Dinas Provinsi, dan lainnya.

“kalau pengunjung yang datang ke mangrove biasanya dari daerah sini-sini juga seperti anak sekolah yang mau melakukan latihan, ataupun sekedar jalan-jalan saja, tergantung hari juga, biasanya pas liburan itu baru banyak yang dari luar daerah. Jika awal-awal buka dulu saya selalu bawa buku kunjungannya, tapi



melihat kondisi juga dan siapa pengungjungnya. Kalau dia orang penting atau ada keperluan mengenai mangrove baru kita data, karena mereka juga pasti mendatangi saya atau kepada anggota lain”.(wawancara 26/02/2019 dengan Ketua KEMPAS Bapak Zakaria)

Dampak dari ekowisata mangrove ini bagi masyarakat adanya lapak bagi masyarakat untuk berjualan di lokasi mangrove, selain itu adanya kerjasama antara KEMPAS dan Genpi Bengkalis dalam menggelar Program Kendurian yang berlokasi di dekat kawasan hutan mangrove. Program ini merupakan strategi KEMPAS untuk mempromosikan ekowisata mangrove kemasyarakat luar daerah dan upaya untuk mengembangkan Desa Sebauk itu sendiri.

“kita hanya menyediakan lokasi pada saat acara Kendurian itu, awalnya mereka meminta izin ke pemerintah Desa, karena kebetulan saya anggota KEMPAS jadi saya arahkan saja lokasinya persis di dekat kawasan mangrove kita. Dan saya juga menyampaikan acara tersebut juga bentuk bantuan promosi mangrove kami kepada masyarakat luar daerah, karena pesertanya pada saat itu memang kebanyakan dari luar daerah dengan total peserta yang terdata sekitar 210 orang, tetapi pengunjung yang datang kelokasi lebih dari 210 orang. Pesertanya ada yang berasal dari Jakarta, Padang, Kampar Pekanbaru dan Dumai”. (wawancara 27/02/2019 dengan Bapak Meftahuddin anggota KEMPAS dan mantan Kepala Desa Sebauk).

Dengan adanya program KEMPAS untuk mengelola mangrove ini juga memiliki tujuan yang baik sehingga berdampak baik bagi masyarakat Sebauk dan bermanfaat bagi masyarakat Sebauk, dengan hasil baik inilah yang kemudian membuat masyarakat ikut mendukung program dari KEMPAS ini, karena secara tidak langsung masyarakat juga menikmati hasil dari program mangrove dan juga menjaga wilayah mangrove.

“saya rasa program mangrove bagus, karena bisa memberikan kita banyak manfaat seperti menghindari dari terjadinya abrasi, tempat kami mencari nafkah dan yang penting membuat Desa kami terkenal dengan adanya mangrove ini” (wawancara 21/03/2019 dengan Bapak Saiful, warga Desa Sebauk).

Sebagai tempat konservasi mangrove, potensinya sebagai tempat ekowisata juga menjadi pilihan bagi para pengunjung untuk datang ke kawasan mangrove Sebauk. Tujuan para pengunjung bermacam-macam, seperti untuk melakukan



penelitian, untuk belajar, tempat berkumpul, tempat latihan, dan untuk sekedar jalan-jalan saja. Belakangan ini, tren berswafoto atau selfi menjadikan tempat ini menarik untuk dikunjungi dan dijadikan status di media sosial. Pada dasarnya bentuk kegiatan masyarakat umum ini juga menjadi bagian partisipasi masyarakat untuk mempromosikan ekowisata bakau ini.

Tujuan dari pembinaan kelompok masyarakat peduli alam sekitar adalah meningkatkan pemahaman, pengetahuan serta partisipasi masyarakat terhadap posisi, peran dan kedudukannya dalam konteks pengelolaan lingkungan didaerahnya. Hasil akhir dari pembinaan kelompok masyarakat peduli alam sekitar adalah bagaimana sebuah kelompok masyarakat mampu untuk mengelola dan mengembangkan potensi lingkungannya, sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakatnya melalui program mangrove.

5. Model Komunikasi Lingkungan dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove Kabupaten Bengkalis.

Komunikasi lingkungan merupakan proses memberikan pemaknaan dan pemahaman mengenai lingkungan kepada seluruh stakeholder yang terkait. Cox menjelaskan bahwa komunikasi lingkungan digunakan untuk menciptakan kesepahaman mengenai permasalahan lingkungan (Cox, 2010). Permasalahan utama yang terkait dengan isu lingkungan yang ada di Pulau Bengkalis adalah kerusakan hutan bakau dan abrasi yang semakin parah. Pemerintah, masyarakat, pengusaha tambak dan pihak-pihak peduli lingkungan tentu harus memiliki kesepahaman terkait dengan hutan mangrove ini. Sampai saat ini memang permasalahan belum didiskusikan secara bersama, sama antar mereka ini. Namun demikian pemerintah dan masyarakat sudah berusaha untuk mengatasi masalah hutan mangrove yang terus dieksploitasi dan daratan yang mengalami abrasi dengan membentuk kelompok-kelompok agar terlibat aktif untuk melestarikan hutan bakau dan menanam kembali yang sudah rusak.

Model komunikasi lingkungan yang berkembang lebih berbasis pada musyawarah antar masyarakat untuk mengantisipasi dalam menyelesaikan masalah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

abrasi dan kerusakan ekosistem bakau. Sebagai dasar perbandingan model komunikasi Kincaid merupakan model komunikasi dua arah yang memungkinkan setiap orang yang terlibat dalam model ini untuk mengemukakan pemikiran mereka (Flor & Cangara, 2018). Setiap orang dalam model komunikasi ini merupakan pembicara aktif, dimana masyarakat dan pemerintah berusaha bersama untuk menyelesaikan masalah abrasi di Kabupaten Bengkalis terutama Pulau Bengkalis yang sudah sangat parah.

Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan dan Kelautan membina kelompok-kelompok untuk terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah abrasi dan kerusakan hutan bakau ini. Kelompok-kelompok masyarakat pelestari hutan bakau ini umumnya masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. KEMPAS sebagai salah satu kelompok yang berada di pesisir pulau Bengkalis bagian selatan memang tidak mengalami kesulitan dalam menanam dan merehabilitasi hutan mangrove, karena tidak mendapatkan gelombang yang besar. Hal ini akan berbeda bila di Pulau Bengkalis bagian utara yang abrasinya lebih parah dengan hantaman gelombang yang lebih besar, sehingga bibit bakau yang baru ditanam akan lebih sulit untuk hidup. Ini akan berbeda bila ditanam di daerah dekan pinggir aliran sungai seperti sungai Liong dan Sungai Kembang di Kecamatan Bantan.

KEMPAS, Blukap dan lainnya, merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai visi dan tujuan untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bersama. Melalui Kelompok Usaha Bersama diharapkan dapat meningkatkan skala yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, kopetensi dan daya saing usaha nelayan. Eksistensi Kelompok Usaha Bersama juga diharapkan dapat menjadi pemicu bagi nelayan untuk memasuki kegiatan yang lebih formal dari kegiatan sebelumnya yang bersifat informal dan subsisten. Dalam menjalankan program pengelolaan ekowisata mangrove, kelompok-kelompok masyarakat ini selalu mengadakan rapat untuk membahas rencana, pembagian kerja dan bagaimana pengelolaan hutan mangrove.



Gambar 5.6 Rapat KEMPAS



Sumber : Arsip KEMPAS 2012

Selain itu rapat ini rutin dilakukan bertujuan untuk menjaga silaturahmi antara anggota, menjaga komunikasi, dan juga sebagai wadah untuk berbagi pemikiran atau gagasan seputar mengembangkan Desa Sebaik.

“kita masih sering mengadakan rapat atau berkumpul biasa bersama anggota lainya guna memperkuat solidaritas kita, biasanya jika ada ide atau jika sebuah rencana untuk mengembangkan mangrove kita kumpulkan anggota dan kita bahas dalam rapat kita. Rapat ini juga bertujuan untuk membagi kerja atau untuk berjaga dikawasan mangrove, kita biasanya tentukan hari ini siapa saja yang bekerja dan apa saja yang akan dikerjakannya nanti di lapangan, biasa berupa perawatan mangrove jika ada yang tumbang atau mati maka akan kita potong. Selain itu kita juga di tugaskan untuk berjaga dari menghindari terjadinya pemotongan liar dari warga setempat, karena sebelumnya pernah kejadian. Kita juga sesama anggota punya aturan sendiri yang harus masing-masing patuhi dan jalani”. (wawancara 29/02/2019 dengan Sekretaris KEMPAS Bapak Nurhadi)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Meftahuddin selaku anggota KEMPAS yang aktif dalam mengikuti perkembangan dan mengelola ecowisata mangrove.

“kalau kumpul bersama anggota saya biasanya kerumah Pak Sekretaris kita, karena memang biasanya tempat rapat kita disana. Biasanya kita membahas tentang kegiatan-kegiatan kita hari besoknya atau kedepannya. Selain itu kita juga membahas bagaimana program ini kedepannya, kita juga berkumpul ini



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

dalam rangka menguatkan solidaritas kita sesama anggota”. (wawancara 27/02/2019 dengan Bapak Meftahuddin anggota KEMPAS).

Selain itu KEMPAS juga menjalin komunikasi dengan instansi pemerintah seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan tentu saja dengan pemerintah Desa Sebauk. Selain dari lembaga pemerintah, KEMPAS juga menjalin komunikasi dengan kelompok-kelompok lain yang ada di Desa Sebauk maupun kelompok dari Desa lain. Komunikasi yang dijalin oleh KEMPAS sesuai prinsip kearifan masyarakat lokal untuk diadakan secara bermusyawarah. Karena komunikasi ini sudah menjadi darah daging bila ada masalah akan selalu diselesaikan bersama dan dikerjakan bersama-sama atau gotong-royong. Komunikasi ini lebih menggunakan saluran komunikasi kelompok yang digunakan tidak terjadi secara satu arah melainkan komunikasi yang dilakukan bersama-sama karena memiliki tujuan dan maksud yang sama, termasuk dengan pihak terkait terutama instansi pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam membina kelompok.

“Biasanya Pak Sofian datang kemari diluar jam dinasnya untuk membahas program kita, biasanya beliau datang saat sore atau malam kadang juga saat hari libur. Beliau datang biasanya untuk melihat perkembangan yang kita lakukan disini dan bagaimana pengelolaan kita terhadap mangrove. Beliau termasuk dekat dengan kita, karena itu komunikasi kami juga santai dan seperti bagian dari anggota KEMPAS juga. Karena beliau juga sudah banyak membantu kita dari awal”. (wawancara 26/02/2019 dengan Sekretaris KEMPAS Bapak Nurhadi).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sofian pada saat wawancara soal kedekatannya dengan KEMPAS. Karena beliau yang memberikan program mangrove kepada KEMPAS dan sering menjalin komunikasi dengan para anggota KEMPAS terkait pengelolaan ekowisata mangrove.

“Waktu saya masih dibagian pengawasan mangrove di Dinas Perikanan, dari tahun 2011 saya sudah tahu kelompok ini dan mulai komunikasi juga. saya sering berkunjung kesana dalam rangka membahas program yang akan kita realisasikan hingga penanam dilakukan. Saya senang dengan kelompok ini karena antusias dari anggota kelompoknya begitu tinggi. Bahkan saya juga kesana diluar jam dinas saya, karena penting untuk menjalin komunikasi dengan kelompok KEMPAS agar program kita benar-benar berjalan dan



berhasil seperti seharusnya kita rencanakan”. (wawancara 20/03/2019 dengan Bapak Sofian dari Dinas Kelautan dan Perikanan).

Dengan melakukan pertemuan secara langsung antara Bapak Sofian dengan KEMPAS, komunikasi interpersonal sebagai saluran diharapkan dapat meningkatkan kualitas komunikasi atau silaturahmi yang baik khususnya antara pemerintah dengan kelompok masyarakat demi terwujudnya program ekowisata mangrove. Kunjungan-kunjungan personal ini akan memperakrab hubungan antar sehingga komunikasi yang dilakukan tidak dilakukan secara formalitas yang terkadang malah menghambat pesan komunikasi lingkungan itu untuk bisa sampai ke khalayak. Saluran komunikasi jelas memiliki keunggulan yang lebih bila dibanding dengan saluran komunikasi yang lain.

Gambar 5.7

Dialog antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove



Sumber : Arsip KEMPAS 2014

Komunikasi KEMPAS dengan Dinas Lingkungan Hidup terjalin pada saat adanya beberapa program yang akan dilakukan seperti sosialisasi dan saat peninjauan lokasi mangrove.

“komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup kita seperti adanya sosialisasi yang kita adakan di Desa Sebauk dan juga peninjauan mangrove dari DLH, DLH memberikan arahan kepada kita bagaimana penanaman mangrove ini, dan memberi pemahaman tentang fungsi daripada mangrove terhadap lingkungan sekitar”. (wawancara 26/02/2019 dengan Sekretaris KEMPAS Bapak Nurhadi).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa model komunikasi yang digunakan KEMPAS lebih dominan menggunakan model komunikasi konvergensi Kincaid. Model ini memungkinkan setiap orang untuk mengutarakan pemikirannya hingga mendapatkan kesepakatan ataupun solusi. Dalam hal ini KEMPAS menerapkan komunikasi dua arah untuk terjadinya interaksi antara kedua belah pihak. Dan berdasarkan observasi yang penulis lakukan, komunikasi yang terjalin baik itu di lingkup internal KEMPAS ataupun antara KEMPAS dengan pihak - pihak luar berbentuk diskusi. Dalam menentukan komunikator awal untuk membuka diskusi biasanya dilakukan oleh anggota KEMPAS yang dituakan atau anggota yang memang memiliki kapabilitas untuk menyampaikan pembahasan. Diskusi diantara anggota KEMPAS ataupun diskusi yang melibatkan beberapa lembaga pemerintah biasanya dipimpin oleh Bapak Nurhadi atau Bapak Meftahuddin. Hal ini dikarenakan kemampuan komunikasi yang dimiliki setiap anggota KEMPAS yang berbeda-beda. Bapak Nurhadi lebih menguasai dan lebih biasa berhadapan dengan kelembagaan sehingga pantas untuk berkomunikasi dengan pihak instansi-instansi formal. Sedangkan Bapak Meftahuddin lebih memahami karakteristik berkomunikasi dengan masyarakat Desa Sebauk karena pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sebauk.

Komunikasi lingkungan merupakan proses proses komunikasi untuk mendukung pembuatan kebijakan, partisipasi publik, dan implementasinya pada lingkungan. Dalam hal ini komunikasi lingkungan sangat penting untuk pelestarian hutan dan pencegahan abrasi pantai yang terjadi pantai pulau Bengkalis. Hutan bakau yang dikembangkan menjadi ekowisata akan memiliki nilai tambah tidak hanya bagi ekosistem, tapi buat masyarakat. Komunikasi lingkungan sangat penting menjadi komponen yang terintegritas dalam kebijakan dan selanjutnya dapat diimplementasikan untuk mendapatkan partisipasi masyarakat.

Kelompok-kelompok penggerak pelestari hutan bakau menjadi inisiatif masyarakat karena kebutuhan mereka untuk mengantisipasi permasalahan lingkungan pantai mereka yang rusak dan mengalami abrasi. Umumnya tujuan dari dibentuknya kelompok-kelompok ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

beberapa permasalahan lingkungan dan membantu program pemerintah. Jadi komunikasi tidak hanya berasal dari kebutuhan program pemerintah, namun ini menjadi bagian masalah utama yang dihasapi masyarakat.

Program komunikasi lingkungan harus fokus untuk memberdayakan audien, melibatkannya dan bukan menempatkannya pada posisi yang pasif (Yenrizal et al., 2015). Menyangkut komunikasi lingkungan dalam pengemgangan ekowisata hutan bakau ini, pemerintah mengemas komunikasi dengan berbagai elemen dan salurannya dalam berbagai medium untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Komunikasi lingkungan ini tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan termasuk hutan bakau, polanya bersifat dialogis, intensif dan lebih banyak terjadi pada komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa dan terutama media sosial. Jadi komunikasi lingkungan bukan hanya sekedar menyediakan dan menyebarkan informasi lingkungan, akan tetapi melibatkan, saling mengingatkan dan memberdayakan seluruh stakeholder untuk terlibat aktif dalam memelihara dan menjaga lingkungan.

Nurul Hakim (2016) menunjukkan bahwa komunikasi dalam mengkonservasi lingkungan yang dilakukan kelompok tani Batu Leong Indah secara dialogis dan aktif, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan pemahaman dan pola pikir petani dalam melakukan penanaman bibit-bibit pohon dan terus menjaga kelestarian lingkungan khususnya di Dusun Batu Leong Kecamatan Sekotong. Komunikasi lingkungan secara dialogis juga menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan secara kelembagaan, hasil penelitian Herutomo (2013) terhadap forum komunikasi pengelolaan hutan bersama masyarakat (FK PHBM) yang dikelola oleh PERHUTANI.

Komunikator utama dalam komunikasi lingkungan adalah pemerintah dan organisasi non pemerintah (NGO) yang punya komitmen terhadap pengelolaan lingkungan (Cox, 2010). Kerjasama dan koordinasi antar berbagai instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

komunikator dan sekaligus fasilitator yang menyampaikan informasi dan pembinaan kepada anggota dan juga masyarakat setempat mengenai pengelolaan lingkungan. Komunikator berperan dalam pencerahan tentang isu-isu lingkungan, jadi dalam era sosial media yang saling mempengaruhi semua masyarakat dapat menjadi komunikator lingkungan. Masyarakat yang menerima informasi tentang situasi dan kondisi lingkungan, secara otomatis harus bertanggung jawab terhadap lingkungan di mana mereka tinggal untuk peduli dan menyebarkan kepada masyarakat lainnya untuk peduli juga. Termasuk adanya upaya yang dilakukan untuk mengalih fungsi lahan, pencemaran, dan eksploitasi hutan bakau, masyarakat yang memiliki kepedulian tentu tidak akan rela melihat ini semakin rusak dan parah.

Kelompok-kelompok yang dibina seperti Blukap dan KEMPAS berperan untuk mengumpulkan dan memobilisasi masyarakat dalam melakukan sosialisasi, sebagai sarana untuk mendidik masyarakat mengembangkan potensi dirinya seperti dalam pengelolaan potensi lingkungan hingga menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomis untuk menunjang ekonomi masyarakat.

Strategi komunikasi lingkungan merupakan langkah awal dan menjadi penentu dalam bagaimana komunikasi lingkungan akan dijalankan. Oleh karena itu, komunikasi lingkungan perlu dipertimbangkan dari banyak hal dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung atau faktor yang menghalanginya dengan memperhatikan tahapan dan langkah-langkah dalam strategi komunikasinya. Tahapan ini sudah distandarisi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu dari menteri Dalam Negeri. Terkait dengan perencanaan kebijakan pengembangan ekowisata mangrove ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah (Pemerintah, 2009). Selain itu ada aturan terkait pengelolaan ekosistem mangrove ini agar sejalan program nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 73 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Peraturan ini



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

mengatur kebijakan daerah agar bisa bersinergi dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem mangrove lestari dan berkelanjutan (Pemerintah Indonesia, 2012).

5.3.1 Langkah-langkah Komunikasi Lingkungan dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove di Pulau Bengkalis

Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pengembangan dan pelestarian ekowisata mangrove berdasarkan pada kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove yang sudah diatur dalam peraturan presiden nomor 73 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Pemerintah Indonesia, 2012). Kebijakan pengembangan ekowisata di daerah juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2009 (Pemerintah, 2009).

Langkah-langkah yang digunakan dalam pengembangan ekowisata Tahap awal yaitu tahap penilaian, yang terdiri dari langkah analisis situasi dan identifikasi masalah, analisis pihak/pelaku yang terlibat, dan tujuan komunikasi. Masalah yang terjadi pada lingkungan yaitu adanya kerusakan di daerah daratan pesisir akibat abrasi dan juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami kondisi lingkungannya, maka dibentuklah Kelompok Masyarakat Peduli Alam Sekitar untuk menjadi solusi dari penyelesaian permasalahan yang ada. KEMPAS bermitra dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membuat sebuah program ekowisata mangrove, dengan adanya program tersebut dimaksudkan agar lingkungan daerah pesisir terkelola dengan baik sehingga dapat membantu dan meningkatkan pendapatan masyarakat Sebauk.

Tahap kedua adalah tahap perencanaan yang terdiri dari pengembangan strategi komunikasi, memotivasi dan memobilisasi masyarakat, dan pemilihan media. Strategi komunikasi dilakukan dengan memilih komunikator yang tepat. KEMPAS melakukan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk menjadi komunikator dalam memberikan sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat maupun masyarakat Desa Sebauk dan Desa lain mengenai pembinaan dan pemahaman dalam mengelola lingkungan. Berikutnya, penggunaan beberapa jenis media dalam suatu komunikasi dapat saja terjadi, namun kelebihan dan kekurangan dari tiap media perlu



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

diperhitungkan agar sesuai dengan situasi dan kondisi komunikasi. KEMPAS menggunakan komunikasi interpersonal, edukasi, konseling dan sosialisasi sebagai media. Dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Tahap ketiga yaitu produksi pesan, yang terdiri dari langkah desain pesan dan produksi media. Pesan-pesan komunikasi lingkungan harus lebih diarahkan pada upaya mengubah kebiasaan yang tidak peduli terhadap lingkungan hidup. Pesan komunikasi yang diproduksi sebaiknya memiliki kriteria yaitu dengan memunculkan isu-isu lingkungan, dan menyampaikan solusi dari masalah lingkungan. Kedua kriteria tersebut diharapkan mampu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan (Asaad, 2014).

Pesan komunikasi lingkungan dimunculkan dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh KEMPAS bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Salah satu contoh sosialisasi yang dilakukan KEMPAS dan Dinas Lingkungan Hidup yaitu tentang “Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan dan Penanaman Bibit Mangrove”. Bentuk pesan lainya yaitu disampaikan melalui penayangan video dokumentasi proses pengelolaan program KEMPAS di *stand* Dinas Lingkungan Hidup. Penayangan video dokumentasi tersebut berisi pesan yang mempersuaf, memberi informasi (isu dan solusi) mengenai pengelolaan dan pelestarian potensi lingkungan.

Tahap keempat yaitu aksi dan refleksi, yang terdiri dari langkah penyebaran melalui media dan langkah dokumentasi, *monitoring*, dan evaluasi. Upaya penyadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup melalui komunikasi lingkungan kuncinya ada pada prioritas dan komitmen politik pemerintah. Dalam pelaksanaan penanaman bibit bakau, KEMPAS bersama-sama mengajak masyarakat Desa Sebaik untuk berpartisipasi melalui pemerintah Desa Sebaik sebagai komunikator. KEMPAS juga mengambil dokumentasi pada saat awal peninjauan lokasi, saat awal penanam hingga saat pengelolaan ekowisata mangrove. Hasil dokumentasi inilah yang nanti digunakan sebagai media kampanye tentang pemahaman dan pembinaan pemanfaatan



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

potensi lingkungan sekitar, dokumentasi KEMPAS ini ditampilkan saat sosialisasi dan moment besar daerah Bengkalis melalui Dinas Lingkungan Hidup sebagai fasilitator. KEMPAS juga melakukan *monitoring* yang berkelanjutan, dan melakukan evaluasi bersama anggota kelompok KEMPAS dan juga pihak terkait bagaimana perkembangan dari program ekowisata mangrove ini.

Berdasarkan observasi yang penulis, dari semua tahapan strategi komunikasi lingkungan yang lakukan oleh KEMPAS, tahapan yang sudah berhasil dan terbilang efektif adalah tahapan assesment atau penilaian, dikarenakan proses dari tahap ini sudah sesuai dengan yang KEMPAS lakukan di lapangan. Sedangkan tahapan yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan merupakan tahap produksi pesan yang terdiri dari langkah desain pesan dan produksi media. Hal ini dikarenakan media yang digunakan oleh KEMPAS masih menggunakan media saluran komunikasi secara langsung. Agar tahap ini bisa efektif, penggunaan media sebaiknya diperluas, seperti media cetak, media elektronik, dan media sosial. Media sosial saat ini menjadi media yang sangat mudah digunakan dan sangat luas jaringan informasinya, sehingga memudahkan KEMPAS dalam melakukan kampanye lingkungan maupun promosi ekowisata mangrove Sebauk.

5.3.2 Komunikasi Lingkungan Berbasis Musyawarah

Program Hutan Mangrove dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi di pantai dan pinggir laut pulau Bengkalis terutama abrasi dan hutan bakau yang rusak. Dengan banyaknya kekhawatiran masyarakat akibat ketidak seimbangan ekosistem di pinggir pantai Pulau Bengkalis inilah muncul dorongan untuk memperbaiki kualitas lingkungan tersebut. Bila tidak ada upaya seperti upaya penyelesaian masalah melalui musyawarah antar masyarakat maka lingkungan bakau dan pantau pulau Bengkalis akan semakin terganggu, karena adanya kerusakan dan kepunahan hutan mangrove yang mengelilingi pulau Bengkalis. Sebagai pihak yang berwenang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, melakukan sosialisasi dan membentuk kelompok yang kompeten untuk melestarikan hutan Mangrove tersebut. Sosialisasi



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

yang dilakukan tentu saja melibatkan masyarakat sebagai pihak atau komunitas yang dilibatkan sehingga pendapat-pendapat atau saran-saran dari masyarakat ini sangat dibutuhkan. Landasan kebutuhan akan lingkungan yang terjaga, hasil laut banyak, bisa meneruskan kepada generasi setelah mereka adalah dasar yang menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri untuk memelihara lingkungan hutan bakau.

Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembentukan kelompok untuk melestarikan hutan mangrove dengan bertujuan, agar kelompok yang telah dibentuk itu dapat melakukan penanaman kembali hutan mangrove yang mulai rusak tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis di Desa Sebauk ini merupakan langkah awal penciptaan sinergisitas program secara terpadu antar Instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. dalam meningkatkan partisipasi kelompok peduli lingkungan yang mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat secara nyata dengan konsep Budidaya mangrove dan Ekosistem mangrove (budidaya ketam, bongan, sepetang dan lainnya).

Pembinaan yang telah dilakukan dari beberapa instansi pemerintah seperti dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup terkait program ekowisata mangrove yaitu, dengan memberikan sosialisasi, pembinaan (diskusi, pelatihan, lomba) pelatihan, monitoring, fasilitator dan juga memberikan bantuan berupa bibit bakau. Melalui pembinaan yang dilakukan, komunikasi yang digunakan lebih banyak melalui proses komunikasi interpersonal maupun komunikasi kelompok. Tujuannya untuk melakukan pendekatan kolaboratif atau silahturami yang berbasis pada masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini melibatkan kelompok masyarakat, Masyarakat Desa, dan Pemerintahan.

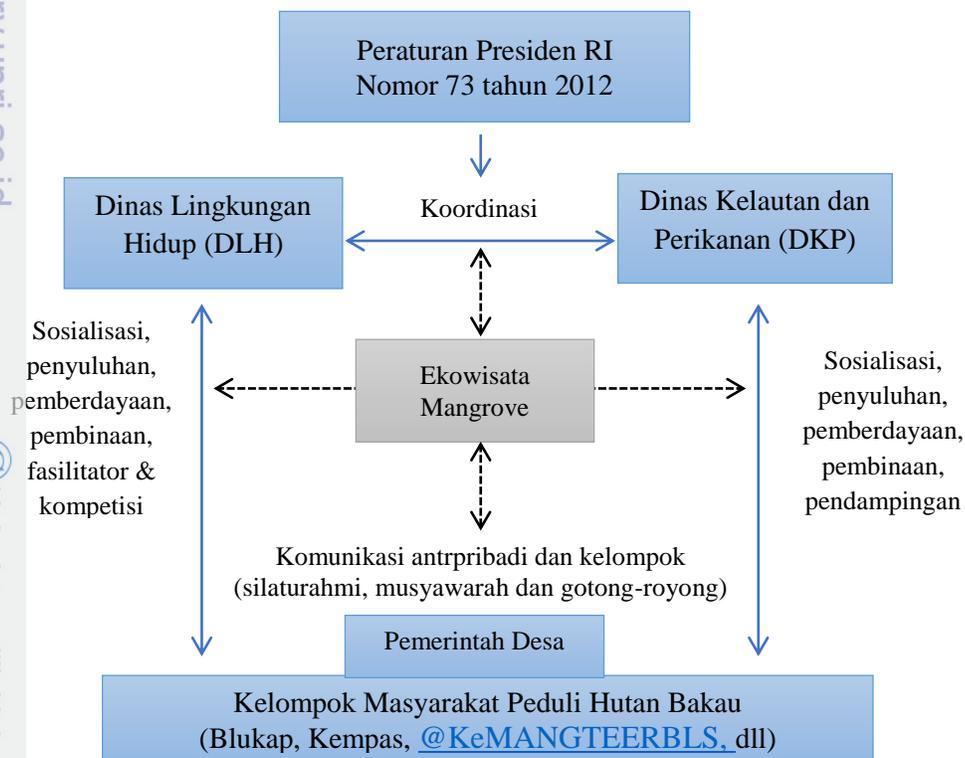
Komunikasi yang digunakan menggunakan saluran komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok yang polanya bersifat dialogis atau interaktif, sehingga antara pemerintah dan kelompok masyarakat saling mempengaruhi. Bentuk komunikasi musyawarah dengan pendekatan kekeluargaan ini merupakan proses sosial yang dimiliki masyarakat setempat. Tidak aneh bila komunikasi lingkungan untuk mengembangkan program ekowisata mangrove dapat dilakukan dengan berbagi peran



dan tanggungjawab masing-masing. Komunikasi dengan tetap mengedepankan nilai budaya setempat ini menjadi nilai tambah bagi kelebihan model komunikasi lingkungan ini.

Model komunikasi lingkungan berbasis musyawarah ini dilaksanakan oleh setiap kelompok secara berkala. Setiap kegiatan musyawarah melibatkan anggota kelompok dan seringkali mengundang perwakilan dari pemerintah baik tingkat desa maupun kabupaten. Seperti pada kelompok KEMPAS, mereka selalu melibatkan tokoh masyarakat Desa dan juga pemerintah. Mereka selalu menyampaikan dan membahas secara bersama tentang masalah lingkungan kepada perintah untuk memberikan pembinaan, pelatihan, dan pendidikan bahkan pendanaan untuk mengatasi masalah lingkungan Pulau Bengkalis.

Gambar 5.8 Komunikasi Lingkungan berbasis Musyawarah



Sumber: Olahan Peneliti, 2019



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Dalam upaya untuk menjaga dan mengelola lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam melakukan sosialisasi, pembinaan dan juga menjadi fasilitator terhadap kelompok-kelompok peduli hutan bakau seperti Bluka, KEMPAS, Kelompok Jaya, dll. Sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan berperan dalam memberikan arahan untuk mengelola lahan pesisir menjadi program ekowisata mangrove. Namun saya Dinas Parwisata dalam hal ini belum membina melalui kelompok Sadar Wisata untuk dapat mengembangkan hutan bakau yang memiliki potensi wisata. Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan juga melakukan pembinaan dan juga pendampingan dengan cara mencarikan perusahaan yang bisa mengembangkan hutan bakau ini menjadi program Corporate Social Responsibility (CSR). Belakangan kelompok Blukap sudah disetujui untuk menjadi kelompok yang dijadikan binaan dan mitra CSR Chevron Pasific Indonesia (CPI). Pemerintah sudah berusaha untuk mengembangkan dan mendapat kan sambuta kelompok-kelompok pengusaha yang berada dibawah naungan kepedulain lingkungan terutama pada hutan mangrove.

Pemerintah Desa di masing-masing setiap daerah yang memiliki hutan bakau dan pesisir pantai yang mengalami abrasi secara tidak langsung turut memberi dukungan kepada kelompok-kelompok pelestari hutan bakau. Peran pemerintah desa ini berupa fasilitator dan memberi saluran bantuan dana desa untuk berbagai pembangunan di sekitar mangrove yang dikembangkan. Dalam hal ini, komunikasi menjadi suatu proses yang sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran dan kepedulian pada lingkungan. Komunikasi sebagai kegiatan yang terus-menerus dilakukan tidak mempunyai permulaan atau akhir dan selalu berubah-ubah atau dinamis.

Beberapa ahli sudah mengembangkan model komunikasi yang tepat, namun dalam konteks komunikasi lingkungan Lawrence Kincaid dan Everett M. Rogers telah mengembangkan sebuah model komunikasi berdasarkan prinsip pemusatan yang dikembangkan dari teori informasi dan sibernetik (Cangara, 2013; Flor & Cangara, 2018). Model ini menggambarkan proses komunikasi yang berlangsung melalui dialog. Dialog atau diskusi dipandang sebagai salah satu model komunikasi yang paling



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

efektif. Hal ini dikarenakan dalam dialog, proses komunikasi berlangsung secara dua arah. Komunikasi dua arah menempatkan seluruh anggota yang terlibat dalam komunikasi setara dan memiliki hak yang sama untuk bersuara. Keadaan seperti ini sangat baik untuk pengendalian mental seluruh anggota diskusi dan memungkinkan cepatnya terjadinya mufakat ataupun pemecahan masalah.

Model komunikasi kelompok seperti Blukap dan KEMPAS sebagai kelompok yang mengelola ekowisata mangrove menggunakan model komunikasi kovergensi Kincaid dalam proses komunikasinya. Mereka mengembangkan komunikasi melalui musyawarah dan dialog dengan sesama mereka bahkan dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah lingkungan yang ada disekitar mereka. Alasan penempatan komunikasi lingkungan dalam perspektif ini, dilatari oleh realita bahwa hidup manusia senantiasa berada dan dipengaruhi oleh konteks lingkungan, tanpa mengenal batas waktu. Manusia senantiasa akan berkomunikasi dan selalu memaknai pesan terikat pada konteks komunikasi antar manusia, yaitu manusia yang terkait dengan lingkungan sekitar. Kelompok ini dibentuk atas dasar keinginan bersama, untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya.

Sebagai sebuah kelompok yang diandalkan, KEMPAS dalam usahanya untuk mengembangkan ekowisata mangrove dilakukan melalui komunikasi interpersonal antara tokoh masyarakat dengan pihak pemerintah yang bertanggung jawab menagani. Disamping itu, saluran komunikasi kelompok tentu tidak bisa diabaikan dalam komunikasi lingkungan pengembangan ekowsata ini. Oleh karena itu, kedua komunikasi ini bersifat dialogis atau interaktif. Komunikasi interpersonal dilakukan oleh anggota KEMPAS untuk membahas program-program yang akan mereka lakukan. Komunikasi ini juga dilakukan untuk menambah kekompakan diantara mereka. Selain melakukan komunikasi interpersonal dengan sesama anggota KEMPAS, mereka juga melakukan komunikasi interpersonal terhadap masyarakat. Ini dilakukan untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat sekaligus untuk mempermudah KEMPAS dalam mensosialisasikan program mereka nantinya.



Komunikasi kelompok dilakukan pula oleh KEMPAS dengan tujuan yang sama yaitu untuk membahas program-program pengembangan ekowisata mangrove. Komunikasi kelompok biasanya dilakukan KEMPAS terhadap pemerintah. Komunikasi secara dialogis ini tidak hanya membahas program namun bisa juga membahas mengenai pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada KEMPAS. Pemerintah akan memberikan pesan – pesan mengenai isu-isu lingkungan, kerusakan, perbaikan maupun pembinaan kepada pihak KEMPAS. Sebaliknya KEMPAS akan mengkomunikasikan program pengembangan ekowisata mangrove kepada pemerintah. Perputran informasi ini terus terjadi sampai kesemuanya mencapai suatu kesepakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.